
**PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, KETAATAN
ATURAN AKUNTANSI DAN PERILAKU TIDAK ETIS TERHADAP
KECENDERONGAN KECURANNGAN AKUNTANSI
(STUDI PADA PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DI AMBON)**

Ali Amin Kalau dan Stevanus Z Leksair

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura
Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to test and analyze empirically the effect of the effectiveness of internal control, obedience to accounting rules, and unethical behavior on the tendency of accounting fraud in State-Owned Enterprises (BUMN) in Ambon City. The population of this research is employees of State-Owned Public Company in Ambon city. Data collection using a questionnaire technique (questionnaire) which was distributed to 32 respondents in this study. The analytical tool used to test the hypothesis using multiple regression models. The results of this study indicate that the effectiveness of internal control variables has an effect on the tendency of accounting fraud, adherence to accounting rules has an effect on the tendency of accounting fraud and unethical behavior also affects the tendency of accounting fraud.

Keywords : *Effectiveness of Internal Control, Compliance with Accounting Rules, Unethical Behavior, Tendency of Accounting Fraud*

JEL Classification : K40, M40, M49, D73

PENDAHULUAN

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) atau *fraud* di Indonesia marak terjadi akhir-akhir ini, di mana hal tersebut menjadi pusat perhatian berbagai media di Indonesia maupun di dunia. Pada sektor publik Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan di sektor swasta bentuk Kecenderungan Kecurangan Akuntansi terjadi dalam bentuk yang sama yaitu ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana (Thoyibatun, 2009:2). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun tak luput dari permasalahan praktik kecurangan akuntansi. Yuli (2013) dalam (Irwansyah & Supriadi, 2018) menyatakan Kecurangan merupakan suatu istilah umum, dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaihan tertentu, yang dipilih oleh seorang

individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah.

Tidak ada aturan yang baku dan tetap yang bisa

dikeluarkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan kecurangan, termasuk kejahatan, tipu muslihat, ataupun cara-cara yang licik dan tidak wajar yang digunakan untuk melakukan penipuan. Batasan satu-satunya dalam mendefinisikan kecurangan adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia.

Kecurangan akuntansi telah mendapat banyak perhatian publik sebagai dinamika yang menjadi pusat perhatian para pelaku bisnis di dunia. Bahkan di Indonesia, kecurangan akuntansi sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Menurut Wilopo (2006), pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan adalah memanipulasi, pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecenderungan menunjukkan adanya indikasi untuk melakukan tindakan yang mengarah adanya kecurangan atau penipuan. Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau

penyalahgunaan kepercayaan, dan omisi fakta kritis (Soepardi, 2007).

Selain itu menurut Wilopo, (2006) dalam Darmawan (2019) Kasus kecenderungan kecurangan akuntansi di Indonesia terjadi secara berulang-ulang. Media massa banyak memberitakan hal tersebut sehingga bagi masyarakat kasus kecenderungan kecurangan akuntansi sepertinya bukan rahasia lagi. Pada sektor publik kecenderungan kecurangan akuntansi dilakukan dalam bentuk kebocoran anggaran pendapatan dan belanja negara. Di sector swasta bentuk kecenderungan kecurangan akuntansi juga terjadi dalam bentuk yang sama yaitu ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana.

Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat korupsi tertinggi di dunia yaitu peringkat 80 dari 180 negara menurut hasil Corruption Perception Index 2019 (transparency international Indonesia dalam www.kpk.go.id, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia belum banyak berubah. Di Indonesia, kecurangan akuntansi dibuktikan dengan adanya likuidasi beberapa bank, diajukannya manajemen perusahaan BUMN dan swasta ke pengadilan, kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, korupsi di komisi penyelenggaraan pemilu, dan DPRD.

Teori Atribusi (Green and Mitchel, 1979) dalam Gifandi (2011), menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang disebabkan oleh atribut penyebab. Dengan demikian maka setiap tindakan seorang pemimpin atau orang yang diberi kewenangan atau kekuasaan selalu dipengaruhi oleh atribut penyebab diantaranya ketika melakukan tindakan kecurangan. Tindakan kecurangan dapat terjadi dipengaruhi bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dan monitoring oleh atasan. Teori Fraud Triangle yang dijabarkan Cressey (1953) dalam Tuannakotta (2007), menyatakan bahwa korupsi juga disebabkan karena adanya 3 faktor yaitu tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization).

Menurut Darmawan (2019), tingginya kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh karyawan disebabkan oleh informasi yang diterima manajemen tidak akurat, tidak relevan, tidak lengkap dan tidak tepat waktu sehingga menjadi penghambat bagi para pembuat keputusan dalam mengambil kebijakan yang tepat bagi pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengendalian internal untuk mengarahkan, mengawasi, pelaporan akuntansi. Pengendalian internal ini berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan serta melindungi sumber daya organisasi, baik yang berwujud maupun

tidak. Pengendalian internal yang efektif dalam suatu instansi merupakan hal yang penting.

Pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi peluang atau kesempatan yang dimiliki oleh karyawan untuk melakukan kecurangan akuntansi. Semakin buruk pengendalian internal yang dimiliki oleh instansi, maka semakin besar pula peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan akuntansi (Irwansyah & Supriadi, 2018). Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil. Keefektifan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan adanya pengendalian internal maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain.

Merujuk pada Agency Theory maka potensi konflik kepentingan selalu ada antara agent dan principle. Untuk mengatasi masalah ini, seharusnya manajemen perusahaan melaksanakan aturan akuntansi dengan benar (Wilopo, 2006). Aturan akuntansi sendiri memberikan pedoman bagi manajemen bagaimana melakukan kegiatan akuntansi dengan baik dan benar, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan mampu menghasilkan informasi yang handal kepada pihak yang berkepentingan. Ikatan Akuntan Indonesia (2002), menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi, untuk mendapatkan kredibilitas informasi tersebut manajemen harus melaksanakan aturan akuntansi yang berlaku umum. Hal ini juga dinyatakan oleh Darmawan (2019) bahwa aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus ditaati dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Informasi yang tersedia dilaporan keuangan sangat dibutuhkan bagi investor dan manajemen jadi harus dapat diandalkan. Dengan demikian ketaatan pada aturan akuntansi diperlukan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi.

Kecurangan Akuntansi juga dipengaruhi oleh perilaku tidak etis yang dilakukan secara sadar oleh seseorang. Kecurangan akuntansi akibat perilaku tidak etis telah banyak menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di Indonesia. Contoh Perilaku Tidak Etis karyawan yaitu seperti yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari

hasil audit anggaran 2010 pada Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), menemukan adanya biaya perjalanan dinas yang tidak wajar senilai Rp 18,5 miliar. Perilaku tidak etis ditunjukkan oleh pegawai dengan memanipulasi biaya perjalanan dinas, dimana pegawai yang sejatinya berpergian menggunakan pesawat PT Garuda Indonesia, tetapi pada kenyataannya menggunakan maskapai swasta lain, namun dalam laporan Perjalannya yang bersangkutan telah melaporkan melakukan perjalanan menggunakan pesawat PT Garuda Indonesia. Meski nilainya tidak besar tetapi karena jumlah orangnya banyak maka jumlah biayanya menjadi besar (Wan, 2011).

Beu dan Buckley (2001:57-73) dalam Thoyibatun (2009:4) menjelaskan perilaku tidak etis adalah satu sikap atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu di mana tujuan tersebut berbeda dari tujuan utama yang telah disepakati sebelumnya. Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan. Menurut Tang et al., (2003) dalam Wilopo (2006:4), Perilaku tidak etis dapat berupa penyalahgunaan kedudukan/posisi (*abuse position*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse power*), penyalahgunaan sumber daya organisasi (*abuse resources*) serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa (*no action*).

Penyebab terjadinya perilaku tidak etis adalah kurangnya pengawasan manajemen di mana hal tersebut dapat memberikan kesempatan karyawan untuk melakukan tindakan tidak etis yang dapat merugikan instansi atau lembaga itu sendiri, ketidakpuasan dan kekecewaan karyawan dengan hasil atau kompensasi yang diperoleh di dalam suatu perusahaan atas apa yang telah mereka kerjakan, dan ketidaktaatan pada aturan akuntansi juga dapat memicu terjadinya perilaku tidak etis. Untuk mengantisipasi dan meminimalkan terjadinya perilaku tidak etis tersebut sebaiknya perusahaan mendorong karyawannya untuk menanamkan sikap dan perilaku etis baik di dalam maupun di luar instansi.

Wilopo (2009:1-49) meneliti mengenai Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perilaku Tidak Etis memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada perusahaan. Semakin rendah Perilaku Tidak Etis dari manajemen pada perusahaan terbuka dan BUMN di Indonesia, maka semakin rendah Kecenderungan Kecurangan Akuntansinya.

Di dalam suatu instansi baik pemerintah maupun swasta tindak kecurangan masih banyak terjadi. Antara lain dikarenakan pengendalian internal yang rendah. Faktanya dalam Laporan BPK RI IHPS I Tahun 2013, BPK RI telah memeriksa 597 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 519 objek pemeriksaan keuangan, objek pemeriksaan kinerja dan 69 objek Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menemukan sebanyak 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan senilai Rp 56,98 triliun. Dari 13.969 kasus tersebut sebanyak 4.589 kasus senilai Rp 10,74 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (BPK, 2013).

Menurut Abdul Halim (2003:197) struktur pengendalian internal merupakan rangkaian proses yang dijalankan entitas, yang mana proses tersebut mencakup berbagai kebijakan dan prosedur sistematis, bervariasi dan memiliki tujuan utama untuk menjaga keandalan pelaporan keuangan entitas, menjaga efektif dan efisiensi operasi yang dijalankan, dan menjaga kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal meliputi lima elemen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Kelima elemen tersebut membantu suatu instansi untuk mencapai tujuannya (Arens, 2008:376). Pengendalian internal harus didukung dengan monitoring untuk memastikan apakah pengendalian internal tersebut berjalan dengan efektif atau tidak.

Temuan BPK RI lainnya adalah maraknya tindak kecurangan akuntansi di Indonesia karena ketidak taatan akan aturan akuntansi. Suatu instansi atau lembaga dapat dikatakan melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku. Fenomena ini terlihat pada kasus yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap 662 objek pemeriksaan terdapat sebanyak 3.452 kasus senilai Rp 9,24 triliun yang berdampak finansial merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian Negara, potensi kerugian Negara dan kekurangan penerimaan (BPK, 2014).

PP RI Nomor 24/2005 dalam Thoyibatun (2009:6) menyebutkan bahwa aturan yang digunakan dalam kegiatan akuntansi adalah standar akuntansi keuangan, sedangkan ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan

keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang ditentukan oleh BPK dan/atau SAP. Penggunaan aturan akuntansi oleh pimpinan dapat memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan kualitas dirinya selaku penerima amanah. Sebab melalui prosedur kerja dan pelaporan keuangan yang sesuai aturan akuntansi, pimpinan dapat menunjukkan bukti kepada pihak penilai kinerja tentang mutu dan efisiensi aktivitas mereka, dan dapat memberikan jaminan dan mutu kontrol dari masyarakat (BAN PT, 2001 dalam Thoyibatun, 2009:6).

Ketaatan terhadap aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi karena apabila laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai atau tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku maka keadaan tersebut dapat menumbuhkan perilaku tidak etis dan memicu terjadinya kecurangan akuntansi di mana hal tersebut akan menyulitkan auditor untuk menelusurinya.

Hasil penelitian Wilopo (2009:1-49) menunjukkan bahwa Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Perilaku Tidak Etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin tinggi ketaatan perusahaan pada aturan akuntansi maka akan semakin rendah Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi yang dilakukan manajemen pada perusahaan.

Banyaknya kasus kecurangan akuntansi yang terjadi menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi masih tinggi baik di pemerintah maupun di perusahaan swasta termasuk BUMN. Padahal perusahaan BUMN didirikan untuk mengembangkan misi dalam memberikan kontribusi kepada negara, pelayanan masyarakat serta mensejahterkan masyarakat. Hal ini juga membuat lemahnya kepercayaan publik kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Faktanya fenomena yang terjadi yaitu BPK melaporkan pada laporan semester 1 tahun 2012 telah terjadi berbagai penyimpangan mulai dari kelemahan sistem pengendalian internal, penyimpangan efisiensi, administrative, dll pada BUMN, BUMD, entitas pemerintah daerah dan pusat serta entitas lembaga keuangan lainnya yang mengelola keuangan negara sekitar Rp. 12,48 triliun (www.bpk.ri.co.id) diakses tanggal 26 Januari 2013.

Pada tingkat daerah, Contoh Perilaku tidak etis dilakukan karyawan/pegawai perusahaan BUMN, ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diantaranya adalah kasus mark-up (penggelembungan dana) pembelian tanah oleh PT. PLN Pikitring Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulamapap) di kawasan Air Besar Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota

Ambon yang bermasalah. Tanah seluas dua hektar dengan senilai Rp 3,3 Miliar untuk pembangunan gardu induk PLN tersebut, di-mark up dengan cara harganya dibayar jauh dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dalam pemeriksaan kasus tersebut ditemukan ada perbedaan harga tanah yang dibeli dengan harga yang seharusnya (www.siwaliamanews.com). Untuk Daerah Kota Ambon sendiri tingkat korupsi menduduki peringkat 4 dari 33 Provinsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penanganan kasus korupsi di Daerah Kota Ambon masih kurang menonjol dengan banyaknya kasus yang berlarut-larut atau dihentikan di Indonesia (Olivia, 2010).

Melihat adanya informasi tersebut bisa dikatakan pula bahwa tindakan kecurangan akuntansi di Daerah Kota Ambon juga tinggi dan tak menutup kemungkinan tindakan kecurangan akuntansi terjadi pada beberapa perusahaan BUMN seperti PT PLN (Persero), PT. Pos Indonesia, PT. Perikanan Nusantara (Persero), PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Telkom (Infokom) dan perusahaan BUMN lain yang ada di Daerah Kota Ambon. Adanya kasus tersebut dan melihat pentingnya Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dalam kegiatan akuntansi pada perusahaan BUMN di Daerah Kota Ambon.

LANDASAN TEORITIS

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) dalam Wilopo (2006:3) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya, hal ini sering kali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk penggelapan tanda terima barang uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atas dokumen palsu atau yang menyesatkan dan

menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Abdul Halim (2003) kecurangan merupakan segala sesuatu yang secara luhur dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menutupi kebenaran, tipu daya, kelicikan atau mengelabui dan cara tidak jujur yang lain.

Dari perspektif kriminal, kecurangan akuntansi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Sutherland, sebagaimana dikutip oleh Geis dan Meier (1977) dalam Wilopo (2006:4) menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih dalam dunia usaha diantaranya berbentuk salah saji atas laporan keuangan, manipulasi di pasar modal, penyuapan komersial, penyuapan dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung, kecurangan atas pajak, serta kebangkrutan.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) adalah keinginan untuk melakukan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur seperti menutupi kebenaran, penipuan, manipulasi, kelicikan atau mengelabui yang dapat berupa salah saji atas laporan keuangan, korupsi dan penyalahgunaan aset.

Keefektifan Pengendalian Internal

Menurut Komaruddin (1994:269) efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa keefektifan adalah keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Dengan demikian keefektifan lebih menitik beratkan pada tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan.

Menurut PP No. 8 Tahun 2006 dalam Adelin (2013:6) pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan, sedangkan menurut Abdul Halim (2003:197) struktur pengendalian internal merupakan rangkaian proses yang dijalankan entitas, yang mana proses tersebut mencakup berbagai kebijakan dan prosedur sistematis, bervariasi dan memiliki tujuan utama :

1) Menjaga keandalan pelaporan keuangan entitas

- 2) Menjaga efektif dan efisiensi operasi yang dijalankan
- 3) Menjaga kepatuhan hokum dan peraturan yang berlaku

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Keefektifan pengendalian internal adalah keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan instansi yang berkaitan dengan menjaga keandalan penyajian laporan keuangan, efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keefektifan pengendalian internal dapat berperan dalam mencegah dan mendeteksi suatu kecurangan akuntansi (fraud) dalam suatu instansi.

Ketaatan Aturan Akuntansi

Ketaatan adalah suatu sikap patuh kepada aturan atau perintah, sedangkan aturan adalah cara atau tindakan yang telah ditetapkan yang harus dijalankan atau dituruti. Di dalam suatu instansi terdapat dasar atau pedoman yang digunakan manajemen dalam menentukan dan melaksanakan jalannya berbagai kegiatan di dalam perusahaan salah satunya adalah aturan mengenai kegiatan akuntansi.

Menurut Rahmawati (2012:9) aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan demikian Ketaatan Aturan Akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya.

Adanya aturan akuntansi tersebut menghindari tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan organisasi. Laporan keuangan berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen dan investor. Apabila laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai atau tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku maka keadaan tersebut dapat menumbuhkan perilaku tidak etis dan memicu terjadinya kecurangan akuntansi di mana hal tersebut akan menyulitkan auditor untuk menelusurinya.

Dalam PP RI Nomor 24/2005 dalam Thoyibatun (2009:6) menjelaskan mengenai aturan yang digunakan dalam kegiatan akuntansi adalah standar akuntansi keuangan. Ketaatan aturan akuntansi

dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang sudah ditentukan oleh BPK dan/atau SAP. Dinyatakan mentaati aturan akuntansi jika perusahaan BUMN telah menerapkan persyaratan pengungkapan, menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik, objektif, memenuhi syarat kehati-hatian dandan memenuhi konsep konsistensi penyajian (PSAK no.1, IAI, 2004).

Perilaku Tidak Etis

Dijk (2000:297-305) dalam Thoyibatun (2009:4) menjelaskan Perilaku Tidak Etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan (Beu dan Buckley, 2001: 57-73).

Buckley et al., (1998) dalam Thoyibatun (2009:4) menyatakan bahwa dalam praktiknya perilaku tidak etis memiliki pola yang rumit. Sebagai gejala kompleks perilaku tidak etis sangat bergantung pada interaksi antara karakteristik personal dengan fenomena asosial yang muncul, sebagai lingkungan dan faktor psikologi yang kompleks. Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa Perilaku Tidak Etis adalah perilaku atau sikap menyimpang yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tetapi tujuan tersebut berbeda dari tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Tang *et al.*, (2003) dalam Adelin (2013:7) menjelaskan indikator dari perilaku yang menyimpang atau tidak etis dalam instansi yaitu:

- 1) *Abuse position* : perilaku yang menyalahgunakan kedudukan atau posisi. Tidak jarang manajemen memanfaatkan jabatan atau posisinya untuk melakukan hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, hal yang bertentangan tersebut seperti kecurangan dalam pelaporan keuangan seperti salah saji jumlah yang sengaja baik melebihisajikan laba atau merendahsajikan laba, pengaturan laba dan perataan laba di mana kecurangan tersebut dilakukan untuk menipu para pemakai laporan keuangan.
- 2) *Abuse power* : perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan. Seorang pimpinan perusahaan atau manajemen puncak memiliki kekuasaan tertinggi di dalam sebuah perusahaan. Namun tidak jarang seorang pimpinan menyalahgunakan kekuasaannya untuk bertindak tidak etis seperti melakukan pencurian aktiva di mana hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan hal tersebut sangat merugikan perusahaan.
- 3) *Abuse resource* : perilaku yang menyalahgunakan sumberdaya organisasi. Pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan dalam suatu perusahaan mungkin saja bisa memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Pemanfaatan tersebut bisa berupa tindakan yang menyimpang seperti melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun penyalahgunaan aktiva. Apabila kejadian ini terus berlanjut perusahaan akan mengalami kerugian di mana perusahaan tidak bisa bertahan lama dalam persaingan bisnis sekarang dan mendatang.
- 4) *No Action* : perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Perilaku ini menjelaskan bagaimana seorang pimpinan yang memiliki kewenangan penuh dalam suatu perusahaan tidak dapat berbuat apa-apa ketika mengetahui karyawan dalam perusahaannya melakukan suatu tindakan kecurangan maupun perilaku yang tidak wajar.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* dengan metode Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN di Kota Ambon. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan BUMN di Kota Ambon, mengingat terbatasnya Jumlah perusahaan BUMN di Kota Ambon menyebabkan peneliti menjadikan semua perusahaan BUMN tersebut menjadi sample. Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sample jenuh (*sensus*). Responden penelitian ini adalah pimpinan atau kepala cabang staf akuntansi karyawan yang berwenang sebagai pengguna anggaran, dan pembuat laporan akuntabilitas pada perusahaan BUMN.

Jenis data data penelitian ini adalah Data primer yang merupakan hasil isian kuesioner yang disebarkan kepada responden. Data dalam Penelitian ini telah diuji melalui pengujian kualitas data dan Berbagai Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis Data.

Pengujian hipotesis data dilakukan dengan uji parsial (*uji t*) gunanya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas secara signifikan terhadap variabel terikat secara parsial atau individu. Tujuan pengujian signifikansi parameter individual adalah untuk mengetahui variabel bebas dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat secara nyata. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-t yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha=0,05$). Metode analisis data menggunakan Metode Analisis Regresi Berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal (X_1), Ketaatan Aturan Akuntansi (X_2), dan Perilaku Tidak Etis (X_3) terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

(Y). Rumus regresi berganda yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Dalam hal ini:

Y = Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

α = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X1 = Pengendalian Internal

X2 = Ketaatan Aturan Akuntansi

X3 = Perilaku Tidak Etis

E = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Penelitian

Data penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan 32 kuesioner yang dipilih menjadi responden pada BUMN yang ada di Kota Ambon. Jumlah kuesioner yang dibagikan sama dengan jumlah kuesioner yang kembali dan semua kuesioner dapat digunakan untuk diolah, sehingga jumlah responden yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 responden.

Tabel (1) Hasil Uji Ketepatan Model (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error Beta			
1 (Constant)	6.422	3.485		1.843	.076
Efektivitas pengendalian intern	-1.253	.407		-934 -3.079	.005
Ketaatan aturan akuntansi	.906	.326		.991 2.780	.010
Perilaku tidak etis	.677	.311		.440 2.179	.038

Sumber: Hasil Olah Data, (2020)

Dari hasil pengujian terlihat bahwa variabel efektivitas pengendalian intern berpengaruh terhadap Kecenderungan kecurangan Akuntansi dengan nilai signifikansi sebesar (0,005) atau < (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengendalian intern berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Namun memiliki beta koefisien negative yang berarti bahwa jika Efektivitas Pengendalian intern menurun (-1.253), maka akan berpotensi menambah pengaruh negative terhadap semakin terjadinya Kecenderungan

Uji-f dilakukan untuk menguji apakah secara bersama variabel independen mampu menjelaskan variable dependen secara baik, hasilnya dapat dilihat pada tabel hasil uji-t hipotesis dibawah ini:

Tabel (2) Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-f)

Model	F	Sig.
Regresi	10.20	.00

Sumber: Hasil olah data (2020)

Berdasarkan hasil uji-f pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai f sebesar 10.20 dengan signifikansi 0.00 berarti dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan dapat mempengaruhi variabel dependen dan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji - t Statistik)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual pada tabel dibawah ini.

- Uji Hipotesis 1

kecurangan akuntansi sebesar (-3.079).

- Uji Hipotesis 2

Dari hasil pengujian terlihat bahwa variabel ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap Kecenderungan kecurangan Akuntansi dengan nilai signifikansi sebesar (0,010) atau < (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Ketaatan Terhadap Aturan Akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Hubungan keduanya memiliki beta koefisien positif yang berarti bahwa jika semakin ditingkatkannya Ketaatan Terhadap Aturan Akuntansi sebesar (0.906), maka akan berpotensi positif

terhadap semakin bernilai positifnya kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar (2.780) atau semakin berkurang terjadinya kecenderungan kecurangan Akuntansi.

- Uji Hipotesis 3

Dari hasil pengujian terlihat bahwa variabel perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan nilai signifikansi sebesar (0.038) atau $< (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Hubungan keduanya memiliki beta koefisien positif yang berarti bahwa jika semakin dikurangnya (dipositifkannya) perilaku tidak etis sebesar (0.677), maka akan berpotensi positif terhadap semakin bernilai positifnya/berkurangnya Kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar (2.179) atau semakin berkurang terjadinya Kecenderungan kecurangan akuntansi.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa, besarnya nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,466 atau sekitar 46.6%. Hal ini memberi arti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabelitas variabel independen sebesar 46.6%, sedangkan sisanya 53.4% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Hasil uji koefisien Determinasi dapat terlihat pada table berikut.

Tabel (3) Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²).

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.720 ^a	.518	.466	2.153

Sumber: output SPSS, hasil olah data, (2020).

Pembahasan

Pengaruh efektivitas pengendalian intern terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Dari hasil pengujian terlihat Hipotesis pertama terlihat bahwa variabel efektivitas pengendalian intern berpengaruh terhadap Kecenderungan kecurangan Akuntansi dengan nilai signifikansi sebesar (0.005) atau $< (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengendalian intern berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Namun memiliki beta koefisien negative yang berarti bahwa jika Efektivitas Pengendalian menurun (-1.253), maka akan berpotensi negative terhadap semakin terjadinya Kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar (-3.079).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama yang di usulkan dalam penelitian tersebut, menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin rendah efektivitas pengendalian intern maka semakin tinggi kecenderungan kecurangan akuntansi atau dengan kata lain efektivitas pengendalian interen yang tinggi maka semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak.

Pengendalian interen adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Kecenderungan kecurangan akuntansi sering terjadi diakibatkan karena ada kesempatan dan peluang yang besar dari individu untuk melakukan kecurangan tersebut. Penerapan pengendalian intern yang efektif dan didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah adanya berbagai tindakan ketidakwajaran atau kecenderungan kecurangan yang akan merugikan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan adanya pengendalian internal yang efektif, maka ada fungsi kontrol terhadap pekerjaan seseorang, apakah sudah dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan, selain itu ada pengecekan saling silang antara seseorang oleh orang lain, sehingga kecenderungan terjadinya kecurangan akan semakin kecil. Peluang terjadinya kecurangan maupun pencurian bisa juga di akibatkan karena lemahnya pengendalian intern yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, dengan pengendalian yang efektif dapat mengurangi kesempatan atau peluang dari seseorang untuk melakukan pencurian atau kecenderungan kecurangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap berbagai Perusahaan BUMN yang ada di Kota ambon dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian yang dilakukan oleh Perusahaan BUMN tersebut telah mampu mengendalikan potensi terjadinya kecurangan akuntansi.

Hal ini diketahui dari Evaluasi atas implementasi Pengendalian Internal di Perusahaan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal dan Auditor Internal di berbagai perusahaan BUMN tersebut. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Auditor Eksternal menunjukkan bahwa secara umum rancangan dan pelaksanaan struktur Pengendalian Internal Perusahaan sudah baik. Perusahaan memiliki fungsi Audit Internal yang bertugas mengevaluasi kecukupan dan efektivitas Pengendalian Internal. Fungsi Audit Internal telah memiliki dan melaksanakan program kerja yang mendukung terciptanya suatu struktur Pengendalian Internal yang

baik di Perusahaan BUMN tersebut. Manajemen telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Auditor Eksternal sebagai bagian dari penyempurnaan penerapan Pengendalian Internal dalam mengurangi berbagai resiko diantaranya seperti terjadinya kecurangan akuntansi. Auditor Internal pada Perusahaan BUMN di Kota Ambon, senantiasa melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pengendalian Internal di Perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk penyempurnaan berkelanjutan atas penerapan Pengendalian Internal.

Langkah-langkah tindak lanjut telah dilaksanakan untuk meminimalkan atau menghilangkan sebab-sebab risiko. Sebagai bentuk hasil evaluasi Pengendalian Internal di Perusahaan, Auditor Internal pada perusahaan BUMN ini telah merencanakan untuk melaksanakan beberapa program kerja tambahan selama tahun 2019 ini, diantaranya melaksanakan *review* dan menyempurnakan sistem dan prosedur audit internal. Selain itu perusahaan BUMN tersebut mulai melakukan transformasi fungsi Audit Internal dalam pelaksanaan audit internal, dari konsep paradigma bahwa Auditor Internal hanya berperan sebagai pengendali kebijakan Perusahaan (*compliance watchdog*) menjadi sebagai pemberi jaminan (*assurance*) dan konsultan (*business partner*) dalam proses bisnis yang dilakukan seluruh unit kerja lain. Pelaksanaan audit yang sebelumnya memfokuskan pada kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan yang akan dilakukan dengan berbasis risiko (*risk based audit*).

Secara umum pelaksanaan pengendalian internal menggunakan metode COSO yang unsur-unsur Pengendalian Internalnya meliputi komponen-komponen lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan. Kelima unsur Pengendalian Internal menurut COSO tersebut telah terimplementasi dengan baik di Perusahaan BUMN yang berada di wilayah Kota Ambon. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelin (2009), Irvansyah dan Syufriadi (2018) serta Damawan (2019) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Dari hasil pengujian Hipotesis kedua, terlihat bahwa variabel ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan Akuntansi dengan nilai signifikansi sebesar (0.010) atau $< (0,05)$, maka dapat

disimpulkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Hubungan keduanya memiliki beta koefisien positif yang berarti bahwa jika semakin ditingkatkannya Ketaatan Terhadap Aturan Akuntansi sebesar (0.906), maka akan berpotensi positif terhadap semakin menurunnya Kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar (2.780) atau semakin berkurang terjadinya Kecenderungan kecurangan Akuntansi.

Aturan akuntansi merupakan sesuatu yang dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan sebagai dasar pengukuran dan penyajian laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat penting dan dibutuhkan oleh semua pihak pengguna informasi laporan keuangan tersebut, sehingga dibutuhkan aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang merugikan perusahaan.

Indikasi kecurangan yang terjadi yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan juga disebabkan karena pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan aturan akuntansi yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan aturan-aturan atau standar yang berlaku maka dapat mengurangi kecenderungan terjadinya kecurangan dalam sebuah perusahaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada prinsipnya perusahaan BUMN di Kota Ambon yang merupakan bagian dari perusahaan BUMN secara terpusat, mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan- *International Financial Report Standard* (PSAK) yang seperti halnya SAK yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Standar ini memang selain perusahaan BUMN, digunakan juga untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, dan lain-lain.

PSAK yang diterapkan oleh perusahaan BUMN di Kota Ambon, sama-sama bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan serta berbagai kebijakan akuntansi lainnya bagi pihak internal/stockholder perusahaan BUMN untuk tetap patuh dan tunduk menjalannya dan juga diperkuat dengan Instruksi Berupa Peraturan-peraturan tentang kebijakan akuntansi lainya dari Kementerian BUMN sehingga secara umum seluruh perusahaan BUMN harus dapat menjalankannya. penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC (*International*

Federation of Accountants) yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi mereka.

Selain itu melalui Kementerian BUMN, ada kebijakan akuntansi tertentu yang juga menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK-ETAP). Dimana perusahaan BUMN menggunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya yang tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK-ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba/rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

Dan setiap penerapannya akan selalu diawasi baik oleh Kementerian BUMN sendiri maupun pihak-pihak eksternal maupun internal yang memiliki kewenangan agar tidak terjadi kecurangan dengan berbagai sanksi yang diterapkan jika melakukan pelanggaran terhadapnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelin (2009), dimana penelitiannya menunjukkan bahwa ketaatan terhadap aturan akuntansi dapat mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi dalam sebuah perusahaan.

Pengaruh Perilaku Tidak Etis terhadap kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Dari hasil pengujian Hipotesis ketiga penelitian, terlihat bahwa variabel perilaku tidak etis berpengaruh terhadap Kecenderungan kecurangan Akuntansi dengan nilai signifikansi sebesar (0.038) atau $< (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Hubungan keduanya memiliki beta koefisien positif yang berarti bahwa jika semakin dikurangnya (dipositifkannya) perilaku tidak etis sebesar (0.677), maka akan berpotensi positif terhadap semakin bernilai positifnya/berkurangnya Kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar (2.179) atau semakin berkurang terjadinya Kecenderungan kecurangan Akuntansi.

Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan tindakan yang salah atau tindakan yang baik dan yang buruk. Nilai-nilai moral seseorang menentukan apakah orang tersebut dapat berperilaku etis atau tidak etis. Perilaku tidak etis merupakan perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan yang telah

disepakati. Dalam konteks lingkungan kerja, lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku tidak etis atau tidak etis. Perilaku tidak etis dapat dipicu oleh banyak hal, dan salah satunya adalah seseorang yang berperilaku tidak etis untuk kepentingan diri sendiri yang tujuannya hanya untuk memperkaya diri dengan cara melakukan kecurangan atau melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sehingga semakin tinggi perilaku tidak etis maka akan menambah kemungkinan terjadinya kecurangan dalam sebuah perusahaan atau suatu organisasi.

Perusahaan BUMN di Kota Ambon sendiri Untuk membangun budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi, Perseroan menyebarkan Pernyataan Kepatuhan untuk semua Pegawai agar mematuhi dan melaksanakan Pedoman Peraturan tanpa kecuali. Penandatanganan pernyataan ini secara umum dan disaksikan oleh pihak Kementerian BUMN telah dilaksanakan pada pertengahan tahun 2012, sebagai salah satu bentuk komitmen seluruh perusahaan BUMN dari Manajemen Puncak hingga pelaksana lapangan untuk menjunjung tinggi dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan dan penegakan Pedoman Perilaku ini adalah bagian dari kepatuhan atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance- GCG). Perseroan BUMN mewajibkan seluruh jajaran Organisasi Perusahaan dan Pegawai, Anak Usaha serta Pemangku Kepentingan untuk menandatangani Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Etika merupakan wujud dan tekad seluruh jajaran dalam menerapkan tindakan etis dan praktek terbaik tata kelola perusahaan yang bersih bebas dari penyimpangan.

Dengan memahami dan mematuhi Pedoman Perilaku, Pedoman GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam berhubungan dan berbisnis dengan Perseroan dan bersama-sama menegakkan lingkungan kerja yang bersih, bebas dari tindakan yang merugikan negara. Sanksi diberikan bagi yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan dan keputusan Perusahaan. Karyawan perusahaan BUMN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku dapat dikenai tindakan-tindakan disipliner secara berjenjang, mulai dari teguran lisan maupun tulisan, peringatan keras dengan skorsing sampai pemutusan hubungan kerja.

Untuk jenis pelanggaran atau *fraud* dalam hal transaksi akuntansi/keuangan lainnya yang mengandung unsur pelanggaran hukum, permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib. Pengenaan sanksi-sanksi oleh perusahaan BUMN di Kota Ambon ini terbukti sangat

efektif menurunkan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan Keuangan perusahaan BUMN di Kota Ambon dan semakin baik kinerjanya sesuai laporan Hasil kunjungan Kerja reses Komisi VI DPR RI ke beberapa BUMN di Kota Ambon dan diwilayah Propinsi Maluku Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019 Tanggal 29 Juli-2 Agustus 2019. (<http://www.dpr.go.id>).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelin (2009), Irwansyah dan Syufriadi (2018) serta Darmawan (2019) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi perilaku tidak etis akan berdampak pada kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi dalam suatu perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian untuk maka dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Pengendalian internal, Ketaatan aturan akuntansi dan minimnya Perilaku tidak etis telah berpengaruh terhadap menurunnya kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan BUMN di Kota Ambon. Hasil ini terindikasi dengan semakin membaiknya Kinerja beberapa BUMN di Kota Ambon.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim (2003). "The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Report to Nation on Occupational Fraud & Abuse." *The Association of Certified Fraud Examiners, Inc.*
- Arens A. Alvin. Elder j. Ronald & Beasley Mark s. (2008). "Auditing dan jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi." Jakarta: Erlangga.
- Aisah, Siti. (2010). "Pengaruh Pengendalian Internal, Kepatuhan, dan Integritas Manajemen terhadap Perilaku Etis Karyawan dalam Sistem Penggajian." *Serpi: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.*
- Anifyani, Hesti Arlich. (2012). "Pengaruh Pengendalian Internal, Kepatuhan, dan Kompensasi Manajemen terhadap Perilaku Etis Karyawan Pada PT ADI SATRIA ABADI." *Jurnal Nominal/Volume 1/Nomor 1.*
- BPK. (2013). BPK Sampaikan 42 Temuan Kepada APH. Diambil dari www.bpk.go.id/news/bpk-sampaikan-42-temuan-kepada-aph-pada-tanggal-11-januari-2017.
- BPK. (2013). BPK RI Serahkan IHPS II Tahun 2013 Ke DPR RI. Diambil dari www.bpk.go.id/news/bpk-ri-serahkan-ihps-ii-tahun-2013-ke-dpr-ri-pada-tanggal-11-januari-2017.
- Eko Darmawan, (2019). "Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi dan perilaku Tidak Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Perusahaan Swasta di Kota Ambon)" *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol.08, No.02, STIE Putra Bangsa Kebumen.*
- Fauzi, M. Glifandi Hari. (2001). "Analisis Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis Dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi." *Jurnal akuntansi dan ekonomi.*
- Ghozali. (2009). "Analisis Multivariate Dengan Program SPSS." Semarang: Undip.
- Hermiyetti. (2008). "Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang." Jakarta: STEKPI.
- Harian Ambon Expres. (2010). Korupsi Di Daerah kota Ambon peringkat 4 dari 33 provinsi . Diambil dari <http://google.com/www.sivaliama.com/read/511694/korupsi-pada-tanggal-11-januari-2017>.
- Health Kompas. (2011). BPK : Keuangan PTN Bermasalah. Diunduh dari www.health.kompas.com/read/2011/07/14/0430211/BPK.Keuangan.PTN.Bermasalah-pada-11-Januari-2017
- [Http://www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)
- Irianto, Gugus. (2009). "Integrity, Unethical Behavior, And Tendency of Fraud." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan.*
- Irwansyah dan Bambang Syufriadi, (2019); "Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 08, No. 2, Universitas Bengkulu.*
- Kusumastuti, Nur Rati. "Analisis FaktorFaktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening." *Serpi: Universitas Diponegoro.*
- Mulyadi. (2002). "Auditing." Yogyakarta: Salemba Empat.

-
- Rahmawati, Ardiana Peri. (2012). "Analisis Faktor Internal dan Moralitas Manajemen terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi." *Skripsi*: Universitas Diponegoro.
- Randa, Fransisku. (2009). "Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Moralitas Manajemen terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi." *Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi* Vol 7 no 2 Oktober 53-85 Fakultas Ekonomi UAJ Makassar.
- Ricky w griffin dan Ronald j Ebert. (2006). "Binis". Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Sawyer, B Lawrence, Mortimer A ditenhofen & James H. Scheiner. (2005). "Sawyer,s Internel Audit, Audit Internal Sawyer." Buku 1: Salemba.
- Sugiyono. (2009). "Metode Penelitian Kualitatif dan R&D." Bandung: Alfabeta.
- Suardi, Eko. (2012). "Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi." *Skripsi*: Universitas Diponegoro.
- Thoyibatun, Siti. (2009). "Faktor – Faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Tuanakotta, T. M. (2007). "Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif". Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI).
- Transparency International. WWW. *Transparency*. Org. diakses pada Januari 2017.
- Wilopo. (2009). "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Padang." Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. www.kpk.go.id.